

## LAPORAN STIMULUS PENELITIAN



### **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF YANG RAMAH LINGKUNGAN DALAM MENGATASI KRISIS ENERGI DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Oleh :  
Zulkarnain, SIP., M.Si**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NASIONAL  
JAKARTA  
2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : **Kebijakan Pengembangan Energi Alternatif Yang Ramah Lingkungan Dalam Mengatasi Krisis Energi Dalam Perspektif Hubungan Internasional**

**Ketua :**

**Nama** : **Zulkarnain , S.IP., M.Si**  
**Tempat/Tanggal Lahir** : **Sipiongot / 23 Februari 1970**  
**NIDN** : **0320027001**  
**Pangkat/Golongan** : **Lektor/ III c**  
**Jabatan Fungsional** : **Dosen Hubungan Internasional FISIP UNAS**  
**Alamat** : **Jl. Munggang No. 22 Rt08/01**  
**Bale kambang, Jakarta Timur**  
**No. HP:081284757944**  
**E-mail: zulkarnainbolak@yahoo.com**

**Jangka Waktu** : **6 bulan**  
**Biaya** : **Rp 1,750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

**Mengetahui**  
**Dekan FISIP UNAS,**

**Jakarta, 15 Februari 2016**  
**Ketua,**

**(Dr. Truly Wangsalegawa., M.A., M.Ed.)**

**(Zulkarnain, S.IP., M.Si)**

**Menyetujui**  
**Wakil Rektor Bidang PPMK,**

**(Prof. Dr. Ernawati Sinaga., MS., Apt.)**

## Abstraksi

Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pengembangan Energi Alternatif Dalam Mengatasi Krisis Energi yang dibahas dari perspektif Hubungan Internasional. Pada perumusan kebijakan nasional yang mencakup politik luar negeri, energi adalah salah satu isu yang dibahas karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Politik Luar Negeri RI akan sangat dipengaruhi oleh potensi energi yang dimiliki suatu negara. Energi memainkan peran yang sangat penting karena energi adalah penggerak sektor perekonomian suatu Negara. Meningkatnya pembangunan akan meningkatkan kebutuhan akan energi pula. Negara yang menguasai energi akan menjadi kuat dan adidaya.

Indonesia memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap isu keamanan pasokan energi mengingat adanya peningkatan konsumsi energi di Indonesia, ketersediaan energi yang semakin terbatas (*scarcity of energy supplies*) dan kecenderungan harga energi yang semakin naik. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa hampir seperempat dari kebutuhan minyak dalam negeri harus diimpor dari negara lain. Oleh sebab itu, adalah sangat krusial bagi Indonesia untuk menemukan cara yang paling tepat untuk menjamin ketersediaan energi yang ramah lingkungan.

Kata kunci: Kebijakan, Energi Security, Krisis Energi

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Abstrak .....	i
Ringkasan.....	i
Daftar Isi .....	iii
Kata Pengantar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II ANALISA ENERGI SECURITY.....	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
BAB IV SIMPULAN.....	21
BAB V JADWAL DAN PENGGUNAAN ANGGARAN .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan penduduk dunia yang diproyeksikan menjadi lebih dari 8 miliar jiwa pada tahun 2030 dari sebesar 6,5 miliar jiwa pada saat ini akan menaikkan konsumsi energi menjadi 120 miliar ekuivalen barel minyak per tahun. Sementara saat ini masih sekitar 2 miliar penduduk dunia yang belum memperoleh pelayanan energi modern, sehingga masih terus berada dalam siklus kemiskinan berkepanjangan, terhambat dalam akses terhadap perkembangan ekonomi, ketersediaan air, makanan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Lebih dari 80% energi primer dunia masih akan berupa energi fosil (minyak, gas, dan batubara) dan minyak masih merupakan bahan bakar utama. Pada tahun 2030, diperkirakan dunia akan memerlukan minyak sebesar 116 juta barel/hari, dibanding 87 juta barel pada tahun 2008. Dengan cadangan minyak dunia sekitar 1,2 triliun barel, pasokan minyak hanya tersedia sampai 30 tahun mendatang. Dunia makin cemas karena bilamana dipetakan, sebagian besar negara-negara di dunia adalah pengimpor minyak.

Pada kenyataannya, hanya Timur Tengah, Rusia serta sedikit wilayah di Afrika dan Amerika Latin yang memiliki kelebihan minyak alias eksportir. Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika ternyata negatif dalam neraca minyaknya, sehingga semua mata tertuju ke Timur Tengah untuk mengamankan masa depan pasokan minyak mereka. Kecemasan tersebut makin meningkat karena bilamana negara-negara seperti Tiongkok dan India mulai konsumtif seperti Amerika Serikat, sumber-sumber tersebut akan habis lebih cepat lagi. Beberapa tahun belakangan penambahan cadangan dunia tidak imbang dengan peningkatan produksi sehingga umur produksi cadangan juga akan menciut. Sudah jarang ditemukan sumber

minyak yang besar, apalagi di kawasan non-OPEC seperti Laut Utara, Amerika, dan lainnya (termasuk Indonesia) yang produksinya terus mengecil.

Merujuk pada *International Energy Forum* di Roma pada tanggal 21 Agustus 2008, para menteri energi dari 74 negara dan 27 pimpinan perusahaan energi raksasa ibarat menghadiri suatu 'konser' yang melantunkan 'irama' saling ketergantungan antarsemua pelaku energi dunia. Semuanya sepakat akan perlunya dialog berkesinambungan dan penanganan bersama sistem energi dunia agar diperoleh suatu stabilitas pasar energi yang pasti, transparan, dan menguntungkan semua pihak.<sup>1</sup>

Indonesia membutuhkan energi dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kinerja perekonomiannya dewasa ini. Kebutuhan total energi Indonesia sebagian besar berasal dari minyak bumi atau bahan bakar minyak (sebesar 54,04%) dan gas alam (sebesar 21,94%). Patut dicatat bahwa Indonesia saat ini masih melakukan impor *Crude Oil* sebesar 400.000 barel/hari dan juga impor BBM rata-rata sekitar 400.000 barel/hari, dengan jumlah mayoritas impor dari Timur Tengah. Cadangan minyak dan gas dunia terpusat hanya di segelintir negara. Saat ini kurang lebih seperempat dari keseluruhan pemakaian minyak di Indonesia berasal hanya dari negara-negara Timur Tengah. Di samping itu, harga minyak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Dengan adanya kebutuhan semakin besar atas kedua sumber energi yang ada, lonjakan kenaikan harga di masa yang akan datang nampaknya tidak akan dapat dihindari.<sup>2</sup>

Isu lain yang terkait dengan masalah energi adalah mengenai dampak konsumsi serta ekspor energi (transportasi atau transit energi) terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan data *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), telah terjadi kenaikan suhu global sebesar 0.6 derajat Celcius. IPCC juga berpendapat bahwa apabila tidak ada hasil yang cukup

---

<sup>1</sup> Maizar Rahman, *Kiat RI Hadapi Krisis Energi*, Investor Daily, 28 April 2008

<sup>2</sup> Ibid

signifikan dalam upaya membatasi gas emisi rumah kaca di dunia, akan terjadi kenaikan suhu rata-rata dunia sebesar 1.4 hingga 5.8 derajat Celcius pada akhir abad ini. Hal ini akan berdampak sangat negatif bagi perekonomian dan ekosistem dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya.

Sampai tahun 2000, Indonesia merupakan produsen minyak terbesar di ASEAN. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan produksi di Indonesia dari hari ke hari. Puncak produksi ASEAN yang dicapai pada tahun 2000 kini mulai menurun. Pada tahun 2008, produksi kawasan ini mencapai 2,6 juta barel per hari. Namun sampai tahun 2030 produksi negara-negara ASEAN diperkirakan akan terus melemah sampai hamper separuhnya, atau menjadi sekitar 1,4 juta barel per hari. Sampai saat ini, produksi minyak Indonesia belum menunjukkan kenaikan. Dengan upaya keras, produksi hanya dapat distabilkan pada tingkat 950 ribu barel per hari. Menurut kajian *Indonesia Energy Outlook 2008*, produksi nasional menurun dengan laju 4,4% per tahun. Kalau skenario itu benar-benar terjadi, maka produksi minyak nasional pada tahun 2030 hanya akan tinggal sekitar 354 ribu barel per hari, sebuah jumlah yang sangat minim tatkala kebutuhan minyak semakin membengkak.

Tanpa adanya kebijakan untuk kenaikan produksi, impor Indonesia akan terus meningkat sehingga pada tahun 2030 diperlukan impor sekitar 2,7 juta barel per hari. Jumlah yang sangat besar ini memerlukan persiapan pengamanan sumber-sumber impor karena ketatnya persaingan dengan negara-negara pengimpor lainnya. Penanganan ketersediannya tidak bisa begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Maizar Rahman, *Masa Depan Pasokan Minyak*, Majalah Trust, 16 Agustus 2010

Indonesia membutuhkan energi dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kinerja perekonomiannya dewasa ini. Kebutuhan total energi Indonesia sebagian besar berasal dari minyak bumi atau bahan bakar minyak (sebesar 54,04%) dan gas alam (sebesar 21,94%). Patut dicatat bahwa Indonesia saat ini masih melakukan impor *Crude Oil* sebesar 400.000 barel/hari dan juga impor BBM rata-rata sekitar 400.000 barel/hari, dengan jumlah mayoritas impor dari Timur Tengah.

Pada dasarnya ancaman terbesar dalam mewujudkan ketahanan energi adalah harga energi (berbasis migas) yang cenderung tidak stabil dan terus meningkat akibat terbentuknya sistem perdagangan minyak dunia yang selalu diwarnai dengan benturan kepentingan antara negara-negara penghasil minyak dengan negara-negara industri maju maupun negara-negara berkembang yang masih mengimpor migas. Harga minyak mentah sangat tergantung pada sistem perdagangan minyak dunia, di mana minyak mentah diperjual belikan dengan instrumen derivatif dan faktor psikologis akan sangat berpengaruh terhadap perilaku pasar.

Harga minyak sekarang didominasi juga oleh ulah spekulasi yang memperdagangkan *paper oil* (semacam surat berharga di mana jumlah minyak yang diperdagangkan bisa 30 kali lebih besar dari jumlah riil minyak yang ada). Perusahaan-perusahaan minyak multinasional yang berasal dari negara industri maju, serupa Chevron, Texaco, Exxon-Mobil, British Petroleum, dan Shell, memiliki peran penting sebagai produsen minyak mentah maupun BBM. Kelompok perusahaan pedagang dan produsen minyak inilah kemudian mampu “membentuk” harga minyak dunia. Pada saat yang sama, terdapat pula negara penghasil minyak, seperti Venezuela dan Rusia, yang menggunakan minyak mereka sebagai “senjata” dalam upayanya menentang dominasi Amerika Serikat. Selain harga minyak, ancaman terhadap ketahanan energi dapat pula muncul akibat terjadinya kerusakan fisik pada infrastruktur dan kilang-kilang minyak yang terkait dengan produksi BBM di negara importir



maupun eksportir minyak mentah, baik yang disebabkan bencana alam, sabotase ataupun akibat perang.<sup>4</sup>

Ancaman terhadap ketahanan energi benar-benar terjadi, maka dikhawatirkan akan berkembang ke arah terjadinya keadaan darurat energi, selanjutnya akan mengganggu kegiatan produksi dan perekonomian yang akhirnya akan menciptakan stagnasi, resesi dan mendorong terjadinya krisis ekonomi global. Sistem ketahanan energi juga memiliki hubungan yang erat dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional, regional dan global. Dalam kondisi damai, suplai minyak mentah sangat tergantung oleh sistem transportasi laut, sedangkan sistem transportasi laut membutuhkan pengamanan kawasan laut. Dalam keadaan darurat perang, jaminan suplai energi menjadi sangat penting dan strategis untuk mendukung operasi militer dan maupun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.<sup>5</sup>

## **2. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan studi ini adalah bagaimana Kebijakan Pengembangan Energi Alternatif Yang Ramah Lingkungan Dalam Mengarasi Krisis Energi Dalam Perspektif Hubungan Internasional.

## **3. Ruang Lingkup Penelitian**

Suatu penelitian membutuhkan pembatasan masalah dengan tujuan untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup> Majalah Oil and Gas

<sup>5</sup> Maizar Rahman, *Ketahanan energi Kawasan Suatu Keharusan*, Harian Suara Karya, 10 Juli 2006

1. Penelitian ini membahas hubungan kebijakan pengembangan energy alternative yang ramah lingkungan

2. Penelitian ini lebih menekankan pada kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Negara-negara lainnya.

#### **4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tentang pengaruh kebijakan pengembangan energy alternative Indonesia yang focus pada:

1. Penelitian ini membahas hubungan kebijakan pengembangan energy alternative yang ramah lingkungan
2. Penelitian ini lebih menekankan pada kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Negara-negara lainnya.

#### **5. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa ilmu politik, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan kajian ketahanan energi

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang signifikan bahwa ada kerjasama Indonesia dengan dunia internasional dalam perspektif hubungan internasional.

3. Sebagai pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam menata dan merumuskan kebijakan internasional.

## BAB II

### ANALISA ENERGY SECURITY

Pengertian ketahanan energi secara umum adalah suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat luas akan energi dapat dipenuhi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), dan akseptabilitas (mutu dan harga). Untuk itu upaya menciptakan *energy security* membutuhkan dukungan dan keterjaminan terhadap akses ataupun sumber-sumber energi serta proses konversi dan distribusi energi yang dibutuhkan untuk menjamin terciptanya *energy security* dalam rangka kelangsungan hidup negara dalam jangka pendek maupun panjang.<sup>6</sup>

Seorang pakar energi terkemuka dunia, Daniel Yergin, mendefinisikan ketahanan energi berdasarkan kepentingan dua jenis negara, yaitu eksportir dan importir. Bagi Negara eksportir, ketahanan energi berarti bagaimana mengamankan permintaan akan produk energi yang mereka miliki untuk menjamin pemasukan finansial yang diperlukan untuk keberlangsungan negara mereka. Contoh negara eksportir adalah Arab Saudi selaku negara pengeksport minyak bumi terbesar di dunia. Sementara itu, Yergin membagi negara-negara importir menjadi negara maju dan berkembang. Bagi negara-negara importir maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang, upaya menjamin ketahanan energi dilakukan melalui diversifikasi energi serta perdagangan dan investasi di kawasan penghasil energi dunia seperti Timur Tengah dan Afrika Utara.

Bagi negara-negara importir berkembang, seperti Indonesia, ketahanan energi dijaga dengan cara mencari solusi yang tepat dalam menyikapi perubahan energi yang akan berdampak pada perekonomian mereka. Negara-negara berkembang sangat berkepentingan

---

<sup>6</sup> Maizar Rahman, *Keamanan, Kebijakan, dan Diplomasi Energi*, Warta Ekonomi

dengan gejolak harga energi global karena isu ini sangat mempengaruhi kondisi sosial dan domestik mereka.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan rawan tanpa keberlanjutan di bidang pasokan energi. Terpusatnya sumber energi hanya di beberapa kawasan seperti Timur Tengah, Rusia, dan negara-negara di sekitar laut Kaspia, beberapa Negara di Afrika serta Amerika Latin menimbulkan kerawanan pasokan bagi dunia. Berulangnya krisis energi dan sangat berfluktuasinya harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fundamental maupun non-fundamental, membuat setiap negara berpikir bagaimana cara menghadapi atau mencegah krisis energi.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep terdepan pada abad ke 21. Pembangunan berkesibambungan memaparkan suatu pembangunan, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan generasi saat ini tetapi tidak membahayakan kesempatan bagi generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Eropa istilah tersebut berasal dari bidang kehutanan, saat ini “pembangunan berkesimbangan” telah menjadi tujuan penting bagi semua bidang kehidupan seperti ekonomi, ekologi, dan kesetimbangan sosial.

Pembangunan dan pembentukan masa depan kita telah menjadi diskusi internasional seperti pada pertemuan tingkat tinggi Konferensi di Rio de Janeiro dan di Johannesburg. Tetapi ini juga menjadi topik pada tingkat nasional di berbagai negara. Sebagai contoh di Jerman “Enquete-Commission” dari 13 Bundestag (Parlemen) Jerman telah membentuk undang-undang “perlindungan manusia dan lingkungan” untuk mendalami dan bekerja pada kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Di laporan akhir dari komisi ini empat atau 5 aturan telah didefinisikan, yang berkaitan perlunya pembangunan berkelanjutan di Jerman. Konsep ini telah diterima oleh beberapa penguasa terdepan (atas) di berbagai bidang baik ekonomi maupun politik. Tetapi untuk menjalankan dasar-dasar ini ke dalam praktek, saat ini perusahaan-perusahaan juga memerlukan konsultan sebagai pengarah, yang kompeten untuk menjalankan aturan-aturan pembangunan berkelanjutan di bidang khusus mereka.

Pembangunan berkelanjutan, juga disebut pembangunan kuat, tahan, atau efisien pertama kali didefinisikan di tahun 1987 oleh Komisi Dunia pada Lingkungan dan Pembangunan, ketua oleh Gro Harlem Brundtland, yang merupakan perdana menteri Norwegia pada saat itu. Pada laporan akhir dari komisi itu yang berjudul “Masa Depan Kita Bersama”, juga disebut Brundtland-Report pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu: Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi yang akan datang menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Dengan kondisi ini, kerja sama ekonomi di dalam berbagai kawasan di dunia sedang berkembang menuju penciptaan keamanan bersama pasokan energi. Kekhawatiran akan krisis energi membuat Uni Eropa terdorong menciptakan kebijakan energi bersama yang menuju kepada pasar tunggal energi Uni Eropa, karena pasar tunggal akan melahirkan kompetisi yang menciptakan efisiensi dan harga energi yang lebih murah. Kebijakan energi bersama merupakan penggabungan kekuatan dalam menangani krisis energi, stabilitas pasokan energi, keragaman energi, juga harga energi. Masalah-masalah terkait lain juga tercakup dalam kerjasama ini, seperti perlindungan lingkungan, pencegahan pemanasan global, serta pengembangan teknologi energi yang lebih efisien.<sup>7</sup>

Dengan adanya berbagai definisi ketahanan energi tersebut, dapat dilihat bahwa setiap negara-negara/kawasan memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam hal energi. Meskipun demikian, benang merah yang dapat ditarik dari isu ketahanan energi ini adalah pentingnya isu tersebut bagi konstituen domestik setiap negara di dunia.

Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan.<sup>8</sup> Di tengah perkembangan dunia yang ditandai oleh saratnya kepentingan nasional masing-masing negara dalam proses negosiasi di tingkat

---

<sup>7</sup> Maizar Rahman, *Ketahanan energi Kawasan Suatu Keharusan*, Harian Suara Karya, 10 Juli 2006

<sup>8</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Menuju Perubahan*, Jakarta : Relawan Bangsa, 2004, Hal. 89

bilateral, regional maupun multilateral maka akan penting bagi Indonesia untuk menentukan sikap dan menempatkan posisi yang tepat dan jelas.<sup>9</sup>

Pada pelaksanaannya dalam tataran domestik ada "kekuasaan, pemerintahan dan hukum", sedangkan politik internasional "adalah bidang kekuasaan, perjuangan, dan akomodasi".<sup>10</sup> Target- target dalam politik luar negeri baik itu target jangka pendek maupun jangka panjang harus ditetapkan terlebih dahulu secara jelas sehingga biaya dan manfaatnya bisa lebih terukur dan transparan. Utamanya adalah bagaimana mengkaitkan strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan nasional dengan langkah-langkah yang ditempuh di tingkat internasional.<sup>11</sup>

Pada sistem politik internasional yang menegaskan perlunya kerangka kerja bagi aktivitas ekonomi, sehingga meskipun kekuatan-kekuatan ekonomi adalah nyata dan memiliki efek yang mendalam pada distribusi kekayaan dan kekuatan di dunia, kekuatan-kekuatan itu selalu bekerja dalam konteks perjuangan politik diantara kelompok- kelompok dan bangsa-bangsa.

Menurunnya politik kekuatan (power politics) pasca berakhirnya perang dingin banyak menaruh harapan akan datangnya iklim internasional yang lebih stabil, damai, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya perkembangan kemakmuran bangsa-bangsa berjalan secara asimetris. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, menjalin hubungan dengan negara lain untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara adalah mutlak dan perlu dilakukan. Dalam kondisi yang semakin mengglobal ini, diplomasi Indonesia menjadi kunci yang cukup penting. Kita dituntut untuk memberikan penjelasan tentang Indonesia ke negara luar. Untuk melangkah ke sana, diperlukan pemahaman tentang percaturan global, sehingga

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Waltz, *Theory of International Politics*, New York : Mcgrawa Hill Reading, 1979, Hal. 113

<sup>11</sup> Yudhoyono, *Op.Cit.*, hal. 96

kita tidak terjebak dalam diplomasi yang involutif dan tetap mampu menunjukkan nasionalisme suatu Negara di tengah desakan internasionalisme yang semakin kuat.<sup>12</sup>

Politik Luar Negeri bidang energi adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah energi global guna mencapai tujuan nasional yakni ketahanan energi. Diplomasi adalah instrumen politik luar negeri untuk mencapai tujuan tersebut. Diplomasi energi merupakan cara yang dapat ditempuh Pemerintah RI untuk mengamankan pasokan energi.

Promosi energi di luar negeri cukup menarik investasi karena Indonesia memiliki beberapa keunggulan, seperti sumber energi cukup besar (40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia) dan ditambah dengan 35% penduduk Indonesia yang belum mendapat akses listrik. Hal ini akan menarik investor luar negeri untuk mengembangkan potensi panas bumi Indonesia. Investor asing diperlukan karena investasi di bidang panas bumi cukup mahal. Sebagai gambaran, untuk menghasilkan 1 MW listrik dibutuhkan kira-kira 3 juta dolar AS. Selain itu, Indonesia juga memiliki pertumbuhan konsumsi energi yang pesat dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia, terutama angkatan kerja yang produktif, juga pesat. Jumlah pekerja yang banyak mengindikasikan dibutuhkannya banyak lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja menandakan pertumbuhan industri yang sudah pasti memerlukan energi.

Diversifikasi energi diperlukan guna menjamin keberlangsungan pembangunan. Pengembangan energi alternatif memerlukan sinergi antar *stakeholder* terutama dari aspek kebijakan, penelitian, dana dan teknologinya. Indonesia memandang penting konservasi dan konversi energi sebagai langkah strategis mengatasi peningkatan kebutuhan energi di masa

---

<sup>12</sup> Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord the World Political Economy*, Princeton : Princeton University Press, 1984, hal. 216

mendatang dan guna menjaga keamanan pasokan energi. Hal terpenting adalah adanya kemauan politis untuk mengarahkan kebijakan energi dari yang berlandaskan energi fosil kepada energi alternatif atau terbarukan. Oleh karena itu, Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Posisi minyak bumi secara bertahap akan digantikan dengan sumber energi lain yaitu batubara, gas, panas bumi serta energi baru dan terbarukan termasuk biofuel. Strategi bauran energi (*energi mix*) Indonesia merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong *green economy* sekaligus sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi.

Potensi energi terbarukan Indonesia yang sangat besar sampai saat ini belum berkembang dengan baik antara lain karena kendala teknologi yang mahal. Oleh karena itu tetap dibutuhkan investasi luar negeri. Untuk mendorong investasi, disinilah diplomasi berperan. Promosi energi yang dapat dilakukan para diplomat RI di luar negeri cukup menarik karena Indonesia memiliki beberapa keunggulan, yakni:

- Sumber energi cukup besar (40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia) dan ditambah dengan 35% penduduk Indonesia yang belum mendapat akses listrik. Hal ini akan menarik investor luar negeri untuk mengembangkan potensi panas bumi Indonesia.
- Konsumsi energi yang pesat dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia. Terutama angkatan kerja yang produktif. Jumlah pekerja yang banyak berarti dibutuhkan banyak lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja menandakan pertumbuhan industri yang sudah pasti memerlukan energi. Hal ini menjamin adanya konsumen domestik bagi investor asing

Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi bauran energi (*energi mix*) untuk mendorong *green economy* sekaligus sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.5/2006 tentang Kebijakan Energi



Nasional dan diikuti dengan Instruksi Presiden No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain, dan Instruksi Presiden No. 2/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain.

Berikut beberapa skenario yang tengah dikembangkan Indonesia di luar negeri guna mengamankan pasokan energi yang berkesinambungan sesuai dengan SK Menteri ESDM no. 2280 K/05/MEM/2007 tentang Koordinasi Antar Unit di Lingkungan Departemen ESDM Dalam Penanganan Forum Dialog/Kerjasama Luar Negeri.

### ***Tingkat bilateral***

- *MoU dengan India*

Isinya pembentukan Working Group untuk sharing info eksplorasi batu bara, *capacity building*, dan alih teknologi. Bentuk pertemuannya berupa *Joint Commision Meeting*. Dirjen Minerbababum Kementerian ESDM sebagai *focal point* dalam kerjasama dengan India.

- *Jepang*

Forum *Coal Policy Dialogue* dan *Indonesia-Japan Energy Round Table*.

### ***Tingkat regional***

Pada tahun 2004, Indonesia bersama-sama dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati beberapa rencana aksi bersama yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan pasokan energi bagi negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN sepakat untuk mendukung proyek pembangunan pipa gas lintas ASEAN (*Trans ASEAN Gas Pipeline*) serta proyek pembangunan jaringan transmisi listrik yang menghubungkan Negara-negara ASEAN (*ASEAN Power Grid*)

### ***Tingkat Multilateral***

- *IRENA (International Renewable Energy Agency)*

Saat ini Indonesia sedang mengusahakan keanggotaan di IRENA. Status organisasi internasional ini belum *full-fledged*. Dibutuhkan ratifikasi oleh 25 negara, dan sampai saat ini baru 18 yang meratifikasi (anggota tidak sama dengan ratifikator). Bentuk pertemuannya baru berupa *preparatory meeting*. Perkembangan terakhir adalah saat ini Kementerian ESDM sudah meminta Pokja terkait untuk membahas keanggotaan. Kemlu juga meminta analisa *cost and benefit* dari ESDM. Pada tahap ini adalah kewajiban ESDM untuk membuat rancangan Perpres terkait keanggotaan dalam IRENA.

Peran Kemlu pada dasarnya adalah mencari peluang di dalam IRENA untuk *capacity building* dan *transfer of technology*. Di dalam IRENA sendiri dapat diamati ada tiga kelompok besar, yakni negara-negara maju seperti kawasan Skandinavia yang porsi energi terbarukannya lebih dari 20%, negara-negara yang industri migasnya besar tapi ingin beralih ke energi terbarukan seperti Uni Emirat Arab, dan negara non-eksportir migas yang ingin menggunakan potensi energi terbarukannya seperti Indonesia.

- *OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)*

Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) didirikan pada 1960 dengan tujuan mengembalikan penguasaan sumber daya alam minyak kepada kedaulatan pemiliknya, yang umumnya negara berkembang. Organisasi ini, menurut anggaran dasarnya, bertujuan menyatukan kebijakan serta melindungi kepentingan anggotanya. Upaya organisasi ini adalah menstabilkan harga di pasar internasional dan mencegah fluktuasi, mengamankan penerimaan minyak yang tetap untuk anggota sambil menjamin pasokan yang teratur, efisien, dan ekonomis kepada negara-negara konsumen, serta memperhatikan keuntungan yang pantas bagi investor.

Indonesia memasuki OPEC pada 1962 karena melihat perjuangan OPEC adalah perjuangan negara ketiga dan juga Indonesia pada waktu itu sudah mulai mengekspor minyak, sehingga memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara anggota OPEC

lainnya. Indonesia menikmati kenaikan harga dari US\$ 2 per barel menjadi US\$ 12 setelah embargo minyak perang Arab-Israel, 1974. Harga yang bagus tersebut sangat membantu pembangunan Indonesia.

Keanggotaan di OPEC meningkatkan posisi Indonesia di forum internasional karena OPEC merupakan organisasi yang sangat disegani di antara organisasi- organisasi negara-negara berkembang. OPEC memiliki solidaritas diplomasi yang tinggi, yang sering dimanfaatkan untuk diplomasi Indonesia menghadapi permasalahan nasional, seperti HAM dan integritas nasional.

Makin merosotnya produksi minyak negara-negara non-OPEC (suatu gejala global yang juga ikut melanda Indonesia), dan tidak ditemukannya lagi lapangan-lapangan minyak raksasa selama 20 tahun terakhir ini, membuat OPEC akan menjadi lebih dominan di masa depan. Hanya Timur Tengah, Rusia, serta sedikit wilayah di Afrika dan Amerika Latin yang kelebihan minyak alias eksportir. Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika ternyata negatif dalam neraca minyak, sehingga semua mata tertuju ke Timur Tengah untuk mengamankan masa depan pasokan minyak mereka. Mereka menyadari bahwa pengamanan dan stabilitas pasokan energi tidak dapat hanya diandalkan kepada kekuatan dan mekanisme pasar. Ini tercermin dari politik dan diplomasi energi mereka kepada negara-negara pemilik minyak tersebut.

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia menghadapi penuaan lapangan minyak, penurunan produksi, dan makin sukarnya ditemukan lapangan minyak baru. Setelah mencapai puncaknya pada 1996, produksi Indonesia terus menurun sesuai karakter alamiah, sementara makin sukar mencari wilayah eksplorasi baru. Kegiatan eksplorasi makin ditingkatkan, namun hasil yang signifikan baru akan dirasakan dalam kurun waktu 5-7 tahun ke depan.

Dari produksi minyak Indonesia kurang dari 1 juta bph (barell per hari), dewasa ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 60-70 persen dan sisanya porsi biaya produksi dan hak

mitra bagi hasil. Dengan konsumsi Indonesia yang lebih dari satu juta bph BBM, harus diimpor 300.000 bph minyak mentah dan 400.000 bph BBM, yang artinya secara keseluruhan Indonesia sudah benar-benar menjadi *net importer*. Oleh karena itu, kepentingan Indonesia sudah bergeser dari *net exporter* menjadi *net importer*.

- *G-20*

Indonesia juga aktif berpartisipasi di G-20 untuk mendiskusikan cara dan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif terhadap volatilitas harga minyak. Ini termasuk prioritas untuk menstabilkan sistem ekonomi global dan untuk memberikan stimulus efektif terhadap permintaan global. Keanggotaan Indonesia di G-20 berkaitan erat dengan penggunaan energi. Hal ini dikarenakan mayoritas anggota G-20 adalah Negara maju pengimpor energi. Isu yang sedang hangat dibicarakan disana adalah penghapusan subsidi energi karena subsidi sendiri adalah distorsi bagi sistem ekonomi. Subsidi tidak mendorong efisiensi energi. Pemberian subsidi harus disesuaikan dengan strata ekonomi konsumen

Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam forum internasional. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri. Menurut Coulombis dan Wolfe, politik luar negeri sintesis dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas.<sup>13</sup>

Politik luar negeri pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu aparat pemerintah mempunyai pengaruh terhadap politik luar negeri. Disamping aparat pemerintah, kekuatan-kekuatan sosial politik yang lebih dikenal dengan *pressure group* ikut berpengaruh pula dalam pembentukan politik luar negeri suatu negara.

Tujuan politik luar negeri adalah untuk memujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran atau keadaan Negara di masa mendatang dan kondisi masa depan

---

<sup>13</sup> Thomas Coulombis dan John Wolfe, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Keadilan dan Power, Bandung: C.V. Abardin, 1990, Hal. 126

yang diinginkan. Pemerintah suatu Negara menetapkan berbagai sarana yang diusahakan untuk dicapai dengan melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan, dan tujuan.

Pelaksanaan politik luar negeri didahului oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan serta harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang di sertai oleh factor-faktor nasional sebagai faktor internal dan faktor internasional sebagai faktor eksternal. Di samping itu, dalam pelaksanaan politik luar negeri harus dipilih teknik maupun instrumen yang cocok untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipergunakan karena penelitian ini adalah proses menggambarkan kerangka politik luar negeri. Metodologi bukan hanya sekedar kumpulan metode atau teknik penelitian, melainkan suatu keseluruhan landasan nilai-nilai (khususnya yang menyangkut filsafat keilmuan), asumsi-asumsi, etika dan norma yang menjadi aturan-aturan yang dipergunakan untuk menafsirkan serta menyimpulkan data penelitian, didalamnya termasuk juga kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian.<sup>14</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian tidak lepas dari suatu paradigma keilmuan. Lebih spesifik metodologi penelitian merupakan implikasi atau konsekuensi logis dari nilai-nilai, asumsi-asumsi, aturan-aturan, serta kriteria yang menjadi bagian integral dari suatu paradigma. Pada intinya setiap paradigma dapat dibedakan dari paradigma lainnya atas dasar sejumlah hal mendasar, antara lain konsepsi tentang ilmu-ilmu sosial ataupun asumsi-asumsi tentang masyarakat, manusia, realitas sosial, keberpihakan moral, dan juga komitmen terhadap nilai-nilai tertentu.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya penyesuaian data dengan menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dan disusun secara sistematis.

---

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 51

### 3.3 Sifat Penelitian

Metode penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan atau memaparkan sekaligus menganalisa sebuah masalah. Maka jelaslah bahwa penelitian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai materi dalam penelitian ini, kemudian data itu di analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut.<sup>15</sup>

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Cara ini merupakan Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, media massa, situs internet dan sumber lainnya, yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang teori-teori dan istilah-istilah serta pengertian-pengertian yang diperlukan. Pengumpulan data dalam penelitian studi politik luar negeri ini menggunakan data yaitu dokumentasi yaitu buku-buku, jurnal politik luar negeri, ataupun surat kabar.

Data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu sumber-sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan diskusi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil olahan data orang lain baik berupa dokumen, laporan, publikasi, dan sebagainya.

### 3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan data (*on going analysis*) dengan menggunakan teknik analisa data yang lazim berlaku dalam

---

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Op Cit*, hlm. 63

penelitian kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode *inductive analysis* dan *logical analysis* (Marshall & Rossman, 1989). Prosedur analisis data kualitatif ini mengandung dua unsur utama, reduksi data dan interpretasi. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif mencakup pengujian (*examining*), pemilihan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa, dan merenungkan kembali data (*completing the coded data*) yang dilakukan secara siklikal untuk membangun inferensi-inferensi, menguji kembali inferensi dan kemudian menarik kembali kesimpulan (Neuman, 1997).

Dalam istilah Neuman (2003) metode analisis yang berlangsung siklikal memberi peluang untuk terus menerus melakukan pengujian konsep dengan data-data dan bukti secara berulang-ulang untuk menemukan inferensi dan teori baru di sebut *successive appromiximation*. Selain itu, karena proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep yang ada sebelumnya tentang kapital sosial, maka proses analisis data akan dilakukan juga dengan menggunakan metode ilustratif (*illustrative method*) dalam pengertian yang longgar. Dengan metode ilustratif peneliti mencoba menerapkan teori kepada suatu *setting* sosial atau situasi historikal yang kongkrit, atau mengorganisasikan data berdasarkan basis teori utama (*lihat* Neuman, 2003).

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap Kebijakan Pengembangan Energi Alternatif di Indonesia dan kerjasama dengan dunia internasional serta department stake holder yang terlibat.



## Bab IV

### SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah adanya saling ketergantungan antar semua pelaku energi dunia. Semuanya sepakat akan perlunya dialog berkesinambungan dan penanganan bersama sistem energi dunia agar diperoleh suatu stabilitas pasar energi yang pasti, transparan, dan menuntungkan semua pihak.

Pada dasarnya kemandirian energi merupakan bentuk implementasi politik bebas aktif Indonesia. Diversifikasi pasokan minyak adalah bentuk kemandirian energi Indonesia agar mampu memiliki banyak pilihan pasokan energi. Ketergantungan pada satu atau dua negara belum cukup, seperti yang saat ini terjadi di mana Indonesia bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Potensi kerja sama dengan Negara lain bisa berupa kerja sama teknologi, perdagangan ataupun investasi. Langkah awal sebaiknya dimulai dengan perdagangan, khususnya dalam hal ini adalah impor minyak.

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah:

- Indonesia harus mengintensifkan diplomasi energi dengan negara-negara pengeksport minyak di luar kawasan Timur Tengah untuk mendapatkan komitmen pasokan jangka panjang, serta menjalin kerja sama pembangunan kilang di Indonesia dengan negara-negara produsen minyak dengan bahan baku minyak mentah dari negara mereka. Indonesia juga harus lebih gencar meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi di luar negeri oleh Pertamina dan minyaknya dapat dibawa ke Indonesia
- Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan keanggotaan dalam *International Renewable Energy Agency* (IRENA). Hal ini mengingat bahwa di masa mendatang setidaknya negara-negara akan terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni: (i) negara yang

menerapkan pola bauran energi dengan persentasi berbeda-beda; (ii) negara pengeksport migas yang mulai memperhatikan perkembangan energi terbarukan; dan (iii) negara pengeksport teknologi energi terbarukan. Pembahasan dalam IRENA diperkirakan akan mencerminkan kepentingan ketiga kelompok tersebut. Indonesia diperkirakan akan jatuh pada kategori ketiga

- Penguatan forum dialog dan kerjasama luar negeri terutama dengan negara maju terkait dengan *transfer of knowledge* serta *transfer of technology* menyangkut pengembangan sumber energi terbarukan.
- Melakukan peninjauan kerjasama perdagangan minyak dengan Venezuela dan Rusia sebagai bentuk diversifikasi pasokan minyak. Hal ini berkaitan dengan kemandirian energi sebagai bentuk diplomasi energi yang membawa misi politik bebas aktif Indonesia dalam kancah energi internasional.
- Menambah kilang minyak dengan maksud memanfaatkan jalur perdagangan minyak internasional via Indonesia. Sebagai contoh, meningkatnya kapasitas penyulingan minyak bumi di China sebesar 90 juta ton pada tahun ini. Cadangan minyak China yang ditargetkan sebesar 197 juta barel, dimana 50% minyak bumi China diimpor dari Timur Tengah. Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dengan menambah kilang minyak di Selat Malaka dan ada kemungkinan juga kapal tanker China melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia lainnya yakni Selat Makassar, oleh karena itu menjadi prospek bagus untuk pembangunan kilang di utara pulau Sulawesi.

## Bab V

### Penggunaan Anggaran Penelitian

#### 5.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan																							
	I				II				III				IV				V				VI			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a) Persiapan administrasi																								
b) Pertemuan tim																								
c) Pengumpulan Data																								
d) Pengolahan data																								
e) Diskusi ( <i>progress</i> )																								
f) Penulisan laporan																								

#### 5.2 Anggaran Penelitian

No	Deskripsi	Unit	Quantity	Budget	Total
1	Transportasi	Orang/pp/wilayah	1/10/	100.000	750.000
2	Konsumsi	Orang/hari/wilayah	1/10/1	100.000	750.000
3	Biaya Tidak Terduga				250.000
<b>Total</b>					<b>1.750.000</b>

## Daftar Pustaka

- Susilo Bambang Yudhoyono, *Menuju Perubahan*, Jakarta : Relawan Bangsa, 2004
- Waltz, *Theory of International Politics*, New York : Mcgrawa Hill Reading, 1979
- Frankel, *Teori Kontemporer Tentang Tingkah Laku Negara*, Jakarta : 1988
- Robert Keohane, *After Hegemoni: Cooperation and Discord the World Political Economy*, Princeton : Princeton University Press, 1984
- Maizar Rahman, *Kiat RI Hadapi Krisis Energi*, Investor Daily, 28 April 2008
- Maizar Rahman, *Masa Depan Pasokan Minyak*, Majalah Trust, 16 Agustus 2010
- Majalah Oil and Gas
- Maizar Rahman, *Ketahanan energi Kawasan Suatu Keharusan*, Harian Suara Karya, 10 Juli 2006
- Maizar Rahman, *Keamanan, Kebijakan, dan Diplomasi Energi*, Warta Ekonomi
- Maizar Rahman, *Ketahanan energi Kawasan Suatu Keharusan*, Harian Suara Karya, 10 Juli 2006